



RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2021

INSPEKTORAT
2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya, dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun Renja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Renja Inspektorat Tahun 2021 memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021. Selain itu, melalui reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi terkini dan tingkat capaian kinerja serta strategi pada setiap unit kerja di Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang disertai dengan kejelasan dan hasil dari program/kegiatan yang direncanakan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergis kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2021.

Demikian Rancangan Awal Renja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini disusun, semoga segala program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bengkalis, 14 Januari 2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	26
3.3. Program dan Kegiatan	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB V PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pelaksanaan otonomi kepada daerah secara luas dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian otonomi daerah memungkinkan daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Termasuk didalamnya penataan perangkat daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi daerah guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

Kabupaten Bengkalis adalah satu diantara 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berdiri sejak tahun 1956 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan luas wilayah 8.402,43 km² yang merupakan sisa pemekaran setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Secara administratif Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan yang letaknya terpencar di 3 (tiga) buah pulau besar yaitu Pulau Sumatera, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rupat.

Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibidang pengawasan, perlu memfokuskan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD periode 2016-2021,yaitu "***Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur di Indonesia***".

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka Inspektorat Kabupaten Bengkalis berperan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan otonomi daerah sehingga dapat terwujud kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku stakeholders utama.

Untuk itu diperlukan pengawasan yang terus menerus guna menjaga agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana, menurut aturan yang ditentukan dan dilaksanakan dengan penuh disiplin oleh mereka yang bertanggungjawab. Pengawasan yang dilakukan dengan efektif dan efisien dapat mencegah terjadinya pemborosan penggunaan keuangan daerah, serta menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan juga merusak citra wibawa pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum sebagai dasar Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322) ;
- k. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis ;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Negara Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11)
- n. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis ;

Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Inspektorat adalah perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan

otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Inspektorat Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis, Inspektorat Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas antara lain :

- a. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten, dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dibidang pengawasan, Inspektur Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

- a) Inspektur;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Penyusunan Program,;
 - (b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - (c) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
- c) Inspektur Pembantu I, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
- d) Inspektur Pembantu II, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
- e) Inspektur Pembantu III. terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
- f) Inspektur Pembantu IV. terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
- g). Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan sarana bagi Inspektorat Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, guna merealisasikan target sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Bengkalis.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Ini, diharapkan dapat terjadi sinkronisasi rencana kerja lintas sektoral antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta aparat Pengawas Internal maupun dari Eksternal dengan harapan adanya koordinasi yang instensif, sehingga pelaksanaan program maupun kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan efektif dan efisien;

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat terjadi sinkronisasi rencana lintas sektoral antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan institusi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkalis, sedangkan dari sistem pembiayaan yang secara langsung digunakan untuk operasional kegiatan;

Rencana Kerja ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui Program dan Kegiatan yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun perubahan (DPPA).

Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.14.726.333.728,00** yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar **Rp.7.118.721.894,00** yang dipergunakan untuk gaji dan tambahan penghasilan PNS, serta **Belanja Langsung** sebesar **Rp.7.607.611.834,00** yang dipergunakan untuk melaksanakan 7 program yang terdiri atas 37 kegiatan.

Realisasi belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2019 sebesar **Rp.6.705.026.292,00 atau 94,19 %** dari total anggaran belanja tidak langsung, sementara itu untuk **Belanja Langsung** tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar **Rp. 5.788.741.939,00 atau sebesar (76,09 %)** yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai sebesar Rp. 416.100.000,00 atau sebesar (5,47%).
- b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp.4.994.234.439,00 atau sebesar (65,65 %).
- c. Belanja Modal sebesar Rp. 378.407.500,00 atau sebesar (4,97 %).

Realisasi Belanja Langsung Inspektorat Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2019 tersebut mencapai 76,09 % dari total Belanja Langsung atau senilai Rp. 5.788.741.939,00 dengan realisasi fisik mencapai 98,16 %. Hal ini menunjukkan terdapat efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Disisi lain secara umum capaian indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis untuk program dan kegiatan Tahun 2019 telah terealisasi dengan baik tidak ada hambatan yang signifikan terhadap pencapaian target kinerja. Dari segi penggunaan dana juga dilaksanakan dengan memperhatikan dengan aspek efektifitas dan efisiensi. Adapun 7 program yang terdiri atas 37 kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan kedaraan dinas/operasional;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah;
- k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
- l. Penyediaan Jasa Sopir Kantor;
- m. Publikasi Informasi Pembangunan;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ;
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;
- c. Pengadaan Mebeleur ;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Displin Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

- a. Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional ;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kegiatan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ;
- b. Evaluasi AKIP SKPD.

6. Program Peningkatan Profesional Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Kegiatan-kegiatan:

- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan ;
- b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

7. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan-kegiatan:

- a. Evaluasi berkala temuan pengawasan ;
- b. Reviu RKA SKPD dan PPKD
- c. Reviu laporan keuangan akhir tahun SKPD
- d. Pemantauan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah ;
- e. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- f. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif ;
- g. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan ;
- h. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bengkalis ;
- i. Gelar Pengawasan ;
- j. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala ;
- k. Pengelolaan LP2P dan LHKPN ;
- l. Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bengkalis ;
- m. Pelaksanaan Pemantauan/Monitoring Tim TP4D Kabupaten Bengkalis.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Bengkalis s/d Triwulan IV Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut.



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE PELAKUKANAN TAHUN ANGGARAN 2019
INSPEKTORAT

Sasaran Pembangunan Tahunan :

KODE	Sasaran RKPd	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (kahir periode RENTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Bejalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENTRA s/d Tahun 2019				Realisasi Anggaran RENTRA s/d tahun 2019	Unit SKPD								
							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENTRA s/d Tahun 2019				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENTRA s/d Tahun 2019													
							I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6	7	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	(16)							
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan surat masuk dan keluar yang diinput	bulan	72	678.971.000,00	36 bulan	256.836.000,00	50%	117.139.000,00	15%	21.000.000,00	15%	23.550.000,00	34%	24.791.000,00	80,00	92.207.000,00	116,00	329.043.000,00	151,11	48,46		
01.001.		Penyediaan jasa sumber tenaga	Jumlah penyediaan air dan minyak	bulan	72	879.589.000,00	36 bulan	326.289.000,00	12	151.730.000,00	3 bulan	28.511.388,00	3 bulan	18.461.977,00	3 bulan	32.027.595,00	3 bulan	29.272.211,00	12,00	103.273.597,00	46,00	435.542.371,00	56,67	49,52
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi, daya air dan listrik	Jumlah kendaraan bahan operasional yang duluak dan STNK dan NR	unit	43	308.624.000,00	19 Unit	76.559.200,00	6 Unit	30.100.000,00	2 unit	2.314.340,00	4 unit	6.381.000,00	2 unit	4.148.250,00	0,-	3.359.000,00	8,00	16.492.590,00	27,00	33.421.591,00	62,79	30,27
01.006.		Penyediaan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan dinas operasional	Jumlah perlengkapan kerbagihan kantor	jenis barang	50,3	509.230.000,00	36	207.462.000,00	30	119.144.060,00	3 item / 3 orang	24.062.105,00	6 item	26.446.178,00	15 item	31.472.272,00	63 item	28.995.779,00	67,00	112.476.735,00	123,00	320.338.735,00	410,00	62,91
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan yang disediakan dan brangk kebersihan yang dilakukan	Jumlah dan tipe kantor yang disediakan	jenis barang	40,8	579.680.000,00	204	218.598.000,00	68 jenis	97.203.000,00	25 jenis	5.713.400,00	20 jenis	14.215.210,00	20 jenis	39.256.100,00	13 jenis	31.554.100,00	68,00	90.835.870,00	272,00	339.433.870,00	86,67	53,38
01.010.		Penyediaan dan tata kantor	Penyediaan barang cuci dan penggarduan	jenis barang	126	925.670.000,00	63	291.858.000,00	21 jenis	155.145.000,00	6 item	8.353.720,00	8 item	16.251.330,00	4 item	68.412.230,00	3 item	43.906.170,00	21,00	136.022.750,00	84,00	427.851.750,00	86,67	46,21
01.011.		Penyediaan barang cuci dan penggarduan																						

KODE	Sasaran RKPd	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENTRA sampaikan dengan RENRA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)	Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan (akhir periode RENTRA)	Realisasi Kinerja Pada Tahunan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENTRA s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENTRA s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RENTRA s/d tahun 2019									
							I		II		III											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp										
06.059.	Evaluasi Akhir SKPD	Jumlah OPD yang dilakukan penilaian SaKIP	213	1.087.900.000,00	80	300.121.000,00	40	158.012.000,00	0	0-	13.225.912,00	40 OPD	7.651.143,00	40,00	69.776.555,00	120,00	398.897.255,00	56,24	35,84	(16)		
21.001.	Program peningkatan profesionalisme fungsi pemerintahan dan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga kerja dan pengawasan	165	2.314.680.000,00	80 orang	1.010.264.210,00	35 orang	300.000.000,00	6 orang	69.177.400,00	9 orang	40.880.400,00	10 orang	19.008.800,00	8 orang	113.000	1.245.272.560,00	68,48	53,80			
21.002.	Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja dan pengawasan dan penilaian akunabilitas kinerja	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Kinerja pengawasan dan penilaian akunabilitas kinerja	180	2.430.420.000,00	90 orang	654.094.200,00	35 orang	343.966.300,00	0	0	0	261.407.437,00	0 orang	-	35 orang	261.407.437,00	125,00	915.501.437,00	69,44	37,67		
22.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Evaluasi berdasarkan temuan hasil pengawasan	264	1.145.750.000,00	132	391.033.000,00	46	192.990.000,00	0	0-	70.825.000,00	0-	32.195.000,00	46 SKPD	84.970.000,00	46,00	187.830.000,00	178,00	578.853.000,00	67,42	51,74	
22.010.	Review RKA SKPD dan PPKD	Jumlah dokumen RKA yang dreviu	264	895.190.000,00	90	222.624.000,00	46	153.330.000,00	0	0-	48 OPD	23.631.245,00	46,00	83.833.245,00	136,00	316.457.245,00	51,52	30,79				
22.015.	Review laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Hasi Revoluti	6	985.023.000,00	3	244.091.500,00	1	148.631.400,00	0	1-	0	1.018.894.722,00	0	0	1.000	101.894.732,00	4,00	345.985.792,00	66,67	35,12		
22.019.	Pemantauan pelaksanaan sistem perpendidikan internal pemerintah daerah	Jumlah pemantauan SPSPD yang dilakukan	12	1.018.460.000,00	6 kali	245.017.000,00	2 kali	121.085.800,00	0	1 kali	60.250.000,00	0	-	59.247.500,00	2 kali	119.761.500,00	2,00	365.784.500,00	66,67	36,21		

KODE	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RENTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENTRA sampaikan dengan RENJA Perangkat Daerah (Tahun n-1) yang di evaluasi (Tahun Lalu (n-2))	Realisasi Kinerja dan anggaran RRD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang di evaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRD yang dievaluasi IV						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENTRA s/d tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENTRA s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019					
						I			II			III			IV			RENTRA A/d Tahun 2019		RENTRA (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)					
						6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
22.021.	Pelaksanaan tuntutan perbandahanan dan koordinasi tuntutan pengawasan yang lebih komprehensi	Jumlah tuntutan pelaksanaan rapat koordinasi	12	632.653.000,00	6 kali	90.402.000,00	2 kali	82.965.300,00	0	304.269.374,00	0	0	0	0	2 kali	54.086.805,00	2.00	54.086.805,00	0	144.488.805,00	8.00	144.488.805,00	66.67		
22.028.	Laporan hasil pemerkiraan, evaluasi, pendampingan (Quality Assurance), Penyelesaian proses hukum terhadap hasil audit jumlah Sistem informasi yang dilaksanakan yang dilaksanakan	TGR	41	2.710.470.000,00	27	955.683.000,00	12	1.090.000,00	0	1.450.000,00	1	4.630.000,00	3	47.160.000,00	5.00	56.820.000,00	32.00	1.042.703.000,00	78,05	1.042.703.000,00	78,05	36,61			
22.031.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepengawasan Pemantauan kota/kabupaten	aplikasi jurnal Keluaran/Desa	6	487.270.000,00	3	150.832.000,00	1	83.453.700,00	0	0-	0-	9.230.000,00	0	0-	0-	36.224.20,00	(1.00)	45.654.20,00	2.00	196.886.20,00	33,33	196.886.20,00	33,33	40,36	
22.033.	Unit Pengabdian Grafitiasi Kabupaten Bengkalis Galeri pengawasan	Jumlah kota/kabupaten yang dilakukan penilaian	3978	2.241.470.000,00	1999	707.932.000,00	663	275.000.000,00	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	1.999,00	707.932.000,00	50,00	1.999,00	707.932.000,00	50,00	31,56		
22.041.	Pelaksanaan pengawasan	Jumlah Kegiatan penilaian	4	419.722.860,00	1 kali	112.633.000,00	11 kali	74.050.800,00	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	68.614.900,00	1.00	68.614.900,00	1.00	181.237.900,00	2,00	181.237.900,00	50,00	43,16
22.145.	Pelaksanaan pengawasan	Jumlah penilaian	6	295.870.000,00	3 kali	297.150.000,00	1 kali	135.212.460,00	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	69.565.105,00	1.00	69.565.105,00	1.00	433.106.705,00	4,00	433.106.705,00	55,67	43,54
22.149.	Pelaksanaan pengawasan	Jumlah pelaksanaan PKPT	0	12.583.120.000,00	270	2.317.062.010,00	90%	2.315.849.000,00	20-	285.880.117,00	30-	76.123.475,00	30-	41.653.200,00	6-	334.555.063,00	(86,00)	1.422.411.675,00	184,00	4.339.413.715,00	*	4.339.413.715,00	*	33,74	
22.151.	Pelaksanaan pengawasan	Jumlah ikutirin laporan LPPB dan LHKPN	264	925.870.000,00	134	247.776.000,00	46	113.070.000,00	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	37.458.600,00	46 OFD	33.420.900,00	46,00	70.679.500,00	180,00	31.8.655.550,00	68,18	34,42
22.152.	Pelaksanaan Sagu Berih Purigam Liar Saber Sungai	Jumlah pemantauan Saber Sungai	9	860.000.000,00	-	163.969.100,00	0	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	39.049.810,00	1.00	49.276.610,00	1.00	49.276.610,00	1.00	49.276.610,00	11,11	5,60
22.153.	Koordinasi Tim Pengawas, Pengamanan dan Pengawasan Daeah Pengukur ukuran APH	Jumlah ikutirin hasil koordinasi	15	460.000.000,00	-	1.152.000,00	-	1.152.000,00	-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	266.025.598,00	14,00	266.025.598,00	14,00	266.025.598,00	14,00	266.025.598,00	35,33	66,51

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Bengkalis institusi pengawasan memiliki tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Selain tugas tersebut Inspektorat Kabupaten Bengkalis juga mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perencanaan Program Pegawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pada tabel berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal											
a.	Temuan BPK	55%	60%	65%	75%	75%	39,91	49,04	65%	65%	75%	
b.	Temuan Inspektorat Kab. Bengkalis	70%	80%	85%	85%	85%	61,99	67,1	85%	85%	85%	
3	Jumlah SOPD/Unit Kerja yang mendapatkan WBK WBBM	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	
4	Nilai Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	-	-	B	BB	BB	B	B	BB	BB	BB	
5	Persentase SOPD yang nilai akuntabilitas kinerja minimal B	-	-	80%	90%	95%	95%	93,33	80,00	95%	95%	
6	Level Keabilitas APIP	-	-	2	3	3	3	2	2	3	3	
7	Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD	-	-	28	32	36	36	19	18	36	36	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Bengkalis tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2018 = B), walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kabupaten Bengkalis masih harus berbenah untuk dapat mempertahankan nilai tersebut atau meningkatkannya.
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP kedepan diperkirakan akan berjalan lamban walaupun di tahun 2019 menunjukkan progres yang menggembirakan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
5. Maturitas Kapabilitas APIP di awal Tahun 2020 harus sudah mendapat level 3 dengan tetap mengedapankan profesionalisme APIP sebagai *quality assurance* bagi Bupati Bengkalis.
6. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah yang mendadak yang berakibat adanya kegiatan yang sebelumnya telah diprogramkan harus ditinjau kembali dan adanya kegiatan-kegiatan baru yang harus diusulkan yang sebelumnya tidak tertampung dalam RKPD dan Renstra 2016-2021.

Berdasarkan Isu-isu tersebut dapat dirumuskan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Inspektorat Kabupaten Bengkalis sesuai dengan peran dan kewenangan agar lebih optimal sehingga perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang adalah :

1. Masih terdapat temuan yang signifikan
2. Masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
3. Masih belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SOPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 telah dituang secara rinci dan jelas dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021. Pada tahun anggaran 2021, Inspektorat Kabupaten Bengkalis merumuskan kebutuhan Program dan Kegiatan berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, Indikator Kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap Program/Kegiatan.

Adapun tabel Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Bengkalis

NO	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Bengkalis	Percentase penerapan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Umum dan Kepegawaian)	95 %	1.942.160.000						
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Bengkalis	Percentase pelayanan surat masuk dan keluar	1800 Surat	50.840.000						
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Kabupaten Bengkalis	Tersedianya jasa komunitasi, air dan listrik	12 bulan	166.910.000						
4	Penyediaan alat kebersihan Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah kendaraan operasional yang diuruskan STNK dan KIR	9 unit	35.000.000						
5	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan kebersihan dan tenaga kebersihan yang disediakan	30 item, 5 orang	130.500.000						
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Bengkalis	Alat tulis kantor yang disediakan	68 jenis	109.810.000						
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Kabupaten Bengkalis	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	21 item	175.690.000						
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bengkalis	Komponen penerangan disediakan	11 item	38.460.000						
9	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Bengkalis	Surat kabar/bahan bacaan yang disediakan bagi pegawai	20 media	49.780.000						
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah rapat/pertemuan, tamu yang disediakan makanan/ minuman	1 Tahun	96.000.000						
			Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	1 Tahun	799.570.000						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Penyediaan jasa keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan	kantor	7 orang	144.900.000					
12	Penyediaan jasa sopir kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga sopir yang disediakan		1 orang	20.700.000					
13	Publikasi Informasi Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	Terkasannya informasi kepada masyarakat:		1 Tahun	40.000.000					
14	Penyediaan Adminstrasi Jasa	Tenaga	Kabupaten Bengkalis	Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melaksanai surat menyurat	5 Orang	84.000.000					
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasrama Termasuk Penelitian	95%	873.056.000					
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bengkalis	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Aparatur		5 Unit	110.000.000					
2	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 item	36.000.000					
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan		17 unit	139.500.000					
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan		1 unit	198.000.000					
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bengkalis	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan		9 unit	290.000.000					
6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkalis	Peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan		5 jenis	99.556.000					
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Peringkat Disiplin Aparatur	95%	106.535.800					
1	Pengadaan pakaian dinas ASN beserta perlengkapannya	Kabupaten Bengkalis	Jumlah pakaian yang disediakan		47 set	70.500.000					
2	Penilaian angka kredit bagi penjabat fungsional	Kabupaten Bengkalis	Jumlah perhitungan angka kredit bagi pejabat fungsional		2 kali	36.035.800					
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				Persentase Pegawai yang Memiliki Kapasitas Sesuai Fungsi	98 %	136.208.000					
1	Sosialisasi peraturan perundangan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisas		100 orang	136.208.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu	95%	151.210.000						
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Bengkalis	Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis	1 laporan	151.210.000						
VI	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Jumlah terlaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan/bimtek	90 %	943.966.300						
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	40 orang	600.000.000						
2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Kabupaten Bengkalis	Pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	30 orang	343.966.300						
VII	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Persentase pelaksanaan pemeriksaan sesuai PKPT dan Non PKPT/Pengawatan	90%	6.314.611.074						
1	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Kabupaten Bengkalis	Laporan Hasil Pemeriksaan/ Pendampingan (Quality Assurance)/ Pendampingan proses hukum	12 Laporan	804.269.374						
2	Evaluasi berkala termuhan pengawasan	Kabupaten Bengkalis	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	46 OPD	212.290.000						
3	Review RKA SKPD dan PPKD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen yang dievaluasi	46 OPD dan PPBD	153.330.900						
4	Review laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Bengkalis	Laporan Hasil Reviu (LHR) atas LKPD Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	153.631.400						
5	Evaluasi AKIP SKPD	Kabupaten Bengkalis	Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi SAKIP	46 OPD	158.012.000						
6	Pemanfaatan pelaksanaan sistem pengendalian Internal Pemerintah daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemantauan SPID yang dilakukan	2 kali	136.085.800						
7	Pelaksanaan perbaikan dan tuntutan genitif rugi	Kabupaten Bengkalis	Jumlah pelaksanaan rapat TGR	2 kali	82.965.300						
8	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepengawasan	Kabupaten Bengkalis	Sistem Informasi/ aplikasi yang dilaksanakan	1 Aplikasi	92.470.000						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9 Kelurahan/Desa	Kotak Saran	Kabupaten Bengkalis	Jumlah kotak saran yang dilakukan pemantauan	663 kotak	-	-	-	-	-	-	-
10 Kabupaten Bengkalis	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Kabupaten Bengkalis	Jumlah kegiatan pencegahan gratifikasi	1 Kegiatan	89.090.800	-	-	-	-	-	-
11 Gelar Pengawasan		Kabupaten Bengkalis	Penyelenggaraan acara Pengawasan Daerah	Gelar	1 Kali	150.212.400	-	-	-	-	-
12 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala		Kabupaten Bengkalis	Persentase pencapaian PKPT		55%	1.600.000.000	-	-	-	-	-
13 Pengjelolaan LP2P dan LHKPN		Kabupaten Bengkalis	Dokumen laporan LP2P, LHKPN dan LHAKSN		46 OPD	113.070.000	-	-	-	-	-
14 Pelaksanaan Sapu Bersih Pugutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bengkalis		Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemantauan Saber Pungli		4 Kali	63.968.100	-	-	-	-	-
15 Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen yang dievaluasi	Dokumen	RKD yang dievaluasi	46 OPD dan PPKD	165.000.000	-	-	-	-
16 Pengadaan Barang Jasa dan Dana Desa	Penyerapan Anggaran	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen PBJ dan DD yang dievaluasi		4 Kali	112.360.000	-	-	-	-	-
17 Survey Penilaian Integritas		Kabupaten Bengkalis	Terevaluasinya kinerja percegahan korupsi institusi		1 Kali	154.500.000	-	-	-	-	-
18 Pencegahan Korupsi Pemkab. Bengkalis	Monitoring, Evaluasi, Rencana Aksi	Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemantauan/monitoring		2 Kali	74.180.000	-	-	-	-	-
19 Monitoring Tim TPA D Kabupaten Bengkalis	Pemantauan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kegiatan yang dilakukan Pengawalan		1 Kegiatan	1.999.175.000	-	-	-	-	-

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal Renja Inspektorat Kabupaten Bengkalis dibahas dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan awal Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang pada tingkat Kecamatan. Pada saat pelaksanaan Musrenbang tersebut tidak ada usulan Program/Kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan. Namun kegiatan yang tertuang dalam Renja adalah Program/Kegiatan yang merupakan tugas utama Inspektorat Kabupaten Bengkalis dan arahan sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD serta Renstra OPD tahun 2016-2021.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis dan integrasi dengan capaian Renstra K/L dan Renstra Provinsi Riau dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis agar keseuaian capaian tersebut dapat memberikan konstribusi secara berjenjang dari Kabupaten Bengkalis ke Provinsi Riau dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi dan Kementerian terkait memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan bidang pengawasan baik tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2016-2021 sehingga diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Dalam rangka mensinergiskan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis, maka berdasarkan rancangan awak RKP awal tahun 2021 dan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat disusun hubungan antara kebijakan Pembangunan Nasional dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 sebagai berikut :

Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah :

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1	Ekonomi	
2	Lingkungan	
3	Politik	
4	Hukum	
5	Pertahanan dan Keamanan	
6	Tata kelola dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan : a. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel b. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintah yang baik
7	Kesejahteraan Rakyat	
8	Kewilayahan	
9	Kelautan	

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkalis maka prioritas nasional yang berkaitan langsung adalah pada prioritas 6 yaitu tata kelola dan reformasi birokrasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam menyusun perencanaan harus mengaju pada Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2016-2021 yang telah tertuang sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dengan Visi yaitu **"Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia"**.

Visi Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021 kemudian dijabarkan di dalam Misi Pembangunan 2016 – 2021. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai Visi Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021, Misi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertangung jawab serta dapat melaksanakan kepimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021, maka Inspektorat Kabupaten Bengkalis telah menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Secara ringkas substansi Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

a. Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah :

“ Menjadi institusi pengawasan yang berkualitas guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bengkalis ”.

b. Misi

Misi Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal;
2. Meningkatkan sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2021
Inspektorat Kabupaten Bengkalis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Mewujudkan pemerintahan yang bersih	1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan meingkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	1. Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis	WTP
			2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal - Temuan BPK - Temuan Inspektorat Kabupaten Bengkalis	75% 85%
		2. Meningkatnya zona integritas	3. Persentase SOPD yang bebas temuan materil	85%
2	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja SOPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkalis	1. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja SOPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1. Jumlah SOPD/Unit Kerja yang mendapat predikat WBK WBBM	1
			1. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 2. Persentase SOPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal B	BB 95%
3	Mewujudnya pengawasan yang menjamin mutu (Quality Assurance)	1. Meningkatnya kapasitas dan SDM pengawasan	1. Level Kapabilitas APIP	3
			2. Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD	36

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Program dan Kegiatan pada tahun 2021 disusun guna penyesuaian Program dan Kegiatan dalam Renstra PD dan dijadikan bahan awal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021. Hal ini memperlihatkan adanya

sinergitas Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan 7 Program dan 45 Kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, yang disertai dengan pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2021, sebagai dokumen acuan bagi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang berisikan Program dan Kegiatan, Output, Outcome, Pagu Indikatif, serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini .

TABEL 4.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2022

KODE	Uraian / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rekana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Jumlah Dana APBD	Catatan Penting	Tarjet Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu/Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 1 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG - Gaji dan Tunjangan	Inspektorat 1 Tahun	10.970.395.900	APBD			1 Tahun	12.615.955.285	
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		10.970.395.900						12.615.955.285
	BELANJA LANGSUNG								
3.00.3.00.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi di Perkantoran (Umum dan Kepegawaihan)	95%	2.204.275.677			98%	2.412.117.571	
3.00.3.00.01.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan Surat Masuk dan Keluar	Inspektorat 1800 Surat	67.840.000	APBD		1800 Surat	74.584.400	
3.00.3.00.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Inspektorat 12 bulan	180.908.992	APBD		12 bulan	199.000.991	
3.00.3.00.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah kendaraan jabatan/ operasional yang diuruskan STNK dan KIR	Inspektorat 9 unit	38.500.000	APBD		9 unit	42.350.000	
3.00.3.00.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan dan tenaga kebersihan yang diajakkan	Inspektorat 30 item, 5 orang	123.738.361	APBD		30 item, 5 orang	136.112.197	
3.00.3.00.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	Inspektorat 60 jenis	134.293.879	APBD		68 jenis	141.008.573	
3.00.3.00.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	Inspektorat 22 Item	156.795.800	APBD		21 Item	193.259.000	
3.00.3.00.01.01.01.012	Penyediaan Komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Instalasi Komponen instalasi listrik/ penerangan Kantor	Inspektorat 11 Item	48.829.400	APBD		11 Item	53.712.340	
3.00.3.00.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan bagi pegawai	Inspektorat 20 media	51.250.000	APBD		20 media	56.375.000	
3.00.3.00.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat/pertemuan yang disediakan makanan/minuman	Inspektorat 12 Bulan	95.948.245	APBD		12 Bulan	105.543.070	
3.00.3.00.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi keluar dan dalam daerah yang dilaksanakan	Inspektorat 12 Bulan	1.029.570.000	APBD		12 Bulan	1.132.572.000	
3.00.3.00.01.01.01.019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	Inspektorat 7 orang	134.400.000	APBD		7 orang	134.400.000	
3.00.3.00.01.01.01.033	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir yang disediakan dalam 1 Tahun	Inspektorat 1 orang	19.200.000	APBD		1 orang	19.200.000	

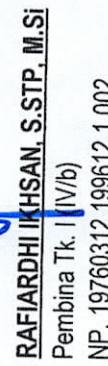
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.3.00.01.01.01.034	Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat	Terpublikasinya Informasi Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat	Inspektorat	12 Bulan	39.000.000	APBD		12 Bulan	40.000.000
3.00.3.00.01.01.01.120	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibutuhkan untuk melayani surat masyarakat	Inspektorat	5 Orang	84.000.000	APBD		5 Orang	84.000.000
3.00.3.00.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan	Inspektorat	90%	1.314.550.000			90%	1.214.805.000
3.00.3.00.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Aparatur dan Mobil Operasional	Inspektorat	5 Unit, terdiri dari Mobil 1 Honda 4	538.000.000	APBD		5 Unit, terdiri dari Mobil 1 Honda 4	388.000.000
3.00.3.00.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor disediakan	Inspektorat	1 item	40.000.000	APBD		1 item	44.000.000
3.00.3.00.01.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Inspektorat	19 unit	166.000.000	APBD		17 unit	182.000.000
3.00.3.00.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Inspektorat	1 unit	198.000.000	APBD		1 unit	198.000.000
3.00.3.00.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Inspektorat	9 unit	270.000.000	APBD		9 unit	290.000.000
3.00.3.00.01.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Inspektorat	5 jenis	102.550.000	APBD		5 jenis	112.805.000
3.00.300.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Inspektorat	80%	97.500.000			85%	107.250.000
3.00.3.00.01.01.03.002	Pengadaan pakaian dinas berseragam	ASN Jumlah pakaian dinas aparatur yang disediakan	Inspektorat	50 stel	37.500.000	APBD		70 stel	41.250.000
3.00.3.00.01.01.03.008	Penilaian angka kredit bagi penjabat fungsional	Jumlah perhitungan angka kredit bagi pejabat fungsional	Inspektorat	2 kali	60.000.000	APBD		2 kali	66.000.000
3.00.3.00.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Pegawai yang Memiliki Kapasitas Sesuai Fungsi	Inspektorat	83%	121.250.000			85%	136.358.000
3.00.3.00.01.01.05.002	Sosialisasi peraturan perundangan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Inspektorat	150 orang	121.250.000	APBD		150 orang	136.358.000
3.00.3.00.01.01.05.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu	Inspektorat	90%	284.940.000			93%	305.940.000
3.00.3.00.01.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis dan Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi/Kinerja/Keuangan yang disusun dengan baik	Inspektorat	1 laporan	174.940.000	APBD		1 laporan	184.940.000
3.00.3.00.01.01.06.029	Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Renstra/Renja yang disiapkan	Inspektorat	2 Dokumen	110.000.000	APBD		2 Dokumen	121.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.01.3.00.01.01.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan/bimtek	80%	981.150.000,00				95%	1.044.961.500
3.00.01.3.00.01.01.21.001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan aparatuer Pengawasan	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD yang mengikuti Diklat/Bimtek dan Pejabat Struktural/Staf yang mengikuti Diklat/Bimtek	Luar Daerah 40 orang	600.000.000 APBD			40 orang	660.000.000	
3.00.01.3.00.01.01.21.002	Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan pengawasan	Luar Daerah 30 orang	381.150.000 APBD			30 orang	384.961.500	
3.00.01.3.00.01.01.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pelaksanaan pemeriksaan sesuai PKPT dan Non PKPT/Pengaduan	80%	6.404.614.544			83%	6.558.910.908	
3.00.01.3.00.01.01.22.007	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Laporan Hasil Pemeriksaan / Evaluasi /Pendampingan	Inspektorat 12 Laporan	1.693.444.374 APBD			12 Laporan	1.693.444.374	
3.00.01.3.00.01.01.22.008	Evaluasi berkala temuan pengawasan	Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi temuan	Inspektorat 46 OPD	233.519.000 APBD			46 OPD	256.870.900	
3.00.01.3.00.01.01.22.010	Review RKA SKPD dan PPKD	Jumlah Dokumen RKA yang di Reviuw	Inspektorat 46 Dokumen	90.100.000 APBD			46 Dokumen	99.110.000	
3.00.01.3.00.01.01.22.015	Review laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan Hasil Reviuw atas LKPD Kabupaten Bengkalis	Inspektorat 1 Dokumen	135.590.000 APBD			1 Dokumen	149.149.000	
3.00.01.3.00.01.01.22.016	Evaluasi AKIP SKPD	Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi SAKIP	Inspektorat 46 OPD	109.787.435 APBD			46 OPD	120.766.179	
3.00.01.3.00.01.01.22.019	Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian Internal Pemerintah dilakukan daerah	Jumlah pemantauan SPIPD yang dilakukan	Inspektorat 2 Kali	145.000.000 APBD			2 Kali	159.500.000	
3.00.01.3.00.01.01.22.021	Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	Jumlah pelaksanaan rapat TGR	Inspektorat 2 Kali	78.447.435 APBD			2 Kali	78.447.435	
3.00.01.3.00.01.01.22.031	Pengembangan Sistem Informasi Tersedianya Sistem Informasi /Aplikasi Manajemen Kepegawaian	Inspektorat 1 Aplikasi	87.200.000 APBD				1 Pakai	87.200.000	
3.00.01.3.00.01.01.22.033	Pemantauan Kotak Kelurahan/Desa	Saran jumlah kotak saran yang dilakukan pemantauan	Inspektorat 663 kotak	- APBD			663 kotak	-	
3.00.01.3.00.01.01.22.041	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Jumlah Pengaduan Gratifikasi	Inspektorat 1 Laporan	94.213.000 APBD			1 Laporan	98.923.650	
3.00.01.3.00.01.01.22.148	Gelar Pengawasan	Penyelenggaraan acara Gelar Pengawasan	Inspektorat 1 Kali	149.160.000 APBD			1 Kali	156.618.000	
3.00.01.3.00.01.01.22.149	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Persentase pencapaian PKPT	Inspektorat 100%	2.250.000.000 APBD			95%	2.250.000.000	
3.00.01.3.00.01.01.22.151	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Jumlah Dokumen Laporan LP2P, LHKPN dan LHKA/SN	Inspektorat 46 OPD	113.070.000 APBD			46 OPD	113.070.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.01.3.00.01.01.22.152	Pelaksanaan Sapu Bersih Pugutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemantauan Saber Pungli	Inspektorat	6 Kali	350.000.000	APBD		3 Kali	367.500.000
3.00.01.3.00.01.01.22.156	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPJ)	Jumlah Dokumen RKPJ yang di Reviu	Inspektorat	1 Dokumen	93.910.700	APBD		1 Dokumen	103.301.770
3.00.01.3.00.01.01.22.157	Reviu Penyerapan Pengadaan Barang Jasa dan Dana Desa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Jasa serta Dokumen Dana Desa yang di Reviu	Inspektorat	4 Dokumen	98.086.600	APBD		4 Dokumen	112.360.000
3.00.01.3.00.01.01.22.158	Survey Penilaian Integritas	Jumlah Dokumen Penilaian Integritas	Inspektorat	1 Dokumen	154.500.000	APBD		1 Dokumen	154.500.000
3.00.01.3.00.01.01.22.159	Monitoring, Evaluasi, Pencegahan Korupsi Benarkalis	Aksi Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Kab. Bengkalis	Inspektorat	2 Kali	83.649.400	APBD		4 Kali	92.014.340
3.00.01.3.00.01.01.22.161	Pelaksanaan Pemantauan / Monitoring Tim TP4D Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Inspektorat	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
3.00.01.3.00.01.01.22.162	Reviu Dana DAK	Laporan Hasil Reviu Dana DAK	Inspektorat	3 Kali	126.986.600	APBD		3 Kali	139.685.280
3.00.01.3.00.01.01.22.163	Pelaksanaan dan pendampingan Siswasekudes	Laporan Hasil Pelaksanaan/Pendampingan	Inspektorat	1 Laporan	232.950.000	APBD		1 Laporan	232.950.000
3.00.01.3.00.01.01.22.164	Reviu Laporan Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Laporan Hasil Reviu LPPD	Inspektorat	1 Dokumen	85.000.000	APBD		1 Dokumen	93.500.000
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG					10.970.395.900				12.615.955.285
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					11.408.280.221				11.780.342.978
JUMLAH BELANJA (BTL + BL)					22.378.676.121				24.396.288.263

Bengkalis,
Januari 2020


INSPEKTUR,


RAFIARDHI IHSAN, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NP. 19760312 199612 1 002

BAB V

PENUTUP

Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis, Inspektorat Kabupaten Bengkalis merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Bengkalis berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 yang mengacu pada penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan uraian singkat tentang penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021, untuk menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinatif, efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan artisipatif dalam rangka melaksanakan kegiatan guna mencapai sasaran program yang tertuang dalam Renja OPD.

Bengkalis, 14 Januari 2020

